

PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA TRANSMIGRAN DAERAH PANTAI Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Antonia Sasap Abao, Nining Sofiati, dan Rita Dewi Trisianti¹

Abstract

The observation and interview with some transmigrants in Karangsewu and Bugel found that the rate of prosperity since they joined the transmigration program was not yet promising. They are some factors causing it, such as less commitment from the government in handling the program and problems inside it, the condition of the land given to the transmigrants were sandy land which is not good for agriculture, and the low quality of human resources itself. All that causing factors resulted in the low level of prosperity of those who joined the transmigration program. It showed in the classification of their family level which is still KS-1 (family with the first level of prosperity). The data collected by doing quick survey through observation and indepth interview.

Keywords: prosperity, household, transmigration.

Pendahuluan

Dalam GBHN 1993 (Propenas) disebutkan bahwa pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Upaya meningkatkan dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia merupakan pengejawantahan pembukaan UUD 1945. Di dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Tjiptoherjanto, 1997: 75).

Dalam usaha mencapai kesejahteraan tersebut, salah satu kebijakan yang perlu dilaksanakan adalah pengalihan dan pelaksanaan program transmigrasi. Petunjuk penyelenggaraan transmigrasi dimasukkan dalam GBHN 1993 yang saat ini disebut Propenas. Dikatakan di dalam Propenas tersebut, penyelenggaraan transmigrasi diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, melalui persebaran penduduk dalam upaya mencapai keseimbangan sumber daya alam dan sumber daya manusia, perluasan kesempatan serta program lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan para transmigran

¹ Mahasiswa Program Studi Kependudukan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada angkatan 2005.

maupun masyarakat pada umumnya, dan sekaligus untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kebijaksanaan transmigrasi didasarkan pada kebutuhan pembangunan daerah serta sumber daya wilayah dan kondisi lingkungan setempat secara terpadu sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan transmigran swakarsa dalam mengembangkan kegiatan ekonomi daerah. Di samping itu, program ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara persediaan dan permintaan tenaga kerja maupun permasalahan pasar kerja spesifik daerah. Pernyataan ini sejalan dengan sasaran kebijaksanaan umum transmigrasi yang ditujukan kepada terlaksananya transmigrasi mandiri yang teratur dalam jumlah yang cukup besar untuk mencapai peningkatan taraf hidup dan pembangunan daerah, keseimbangan penyebaran penduduk dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada, serta memperkuat pertahanan dan keamanan nasional (Kustadi, 1984: 51).

Seharusnya proyek transmigrasi ditempatkan pada lahan yang subur agar mampu menciptakan kesejahteraan bagi mereka sendiri maupun penduduk setempat dan akhirnya dapat berimplikasi pada terwujudnya tujuan pembangunan secara makro. Namun kenyataan di lapangan sejak dahulu hingga sekarang penanganan kasus transmigrasi selalu mengalami hambatan yang sama, yaitu penempatan penduduk pada lahan yang marginal (*infertile area*) dengan aksesibilitas wilayah yang rendah. Akhirnya, tujuan transmigrasi justru melenceng karena telah menjadi kerangka eksperimen dalam usaha pemanfaatan lahan marginal di Indonesia (Hardjono, 1982: 60).

Dalam transmigrasi, sebenarnya transmigran diberi aset produksi berupa lahan dan bantuan sarana produksi pertanian lainnya. Bantuan tersebut memungkinkan para transmigran mengembangkan sektor pertanian sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya. Namun karena tanah yang diperoleh transmigran merupakan lahan marginal dan terbatasnya kemampuan modal yang dimiliki, produktivitas usaha tani justru lebih rendah bila dibandingkan dengan di daerah asal. Menurut Malingreau (1978), ukuran keberhasilan proyek transmigrasi adalah pendapatan sebagai indikator kinerja dan penyesuaian transmigran di tempat baru. Tinggi rendahnya pendapatan transmigran banyak ditentukan oleh faktor kualitas lahan dan kemampuan air, luas lahan, teknologi, informasi yang berhubungan dengan praktik pertanian, input, karakteristik transmigran, dan lokasi penempatan, utamanya daya dukung wilayah.

Program transmigrasi sebenarnya tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan transmigran, tetapi juga penduduk lokal yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu, belakangan ini digalakkan program transmigrasi lokal yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk sekitar lokasi transmigrasi dalam jumlah yang relatif banyak. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi keseimbangan peningkatan kesejahteraan antara pendatang dengan penduduk di sekitar lokasi penempatan. Dalam kaitan ini, Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya membangun program pemberdayaan penduduk dengan mengembangkan transmigrasi lokal, yang

berlokasi di Kecamatan Galur. Transmigrasi tadi kemudian dikenal sebagai transmigrasi Bugel dan Karangsewu. Daerah transmigrasi ini dirancang sebagai pengembangan wilayah pantai yang dilengkapi dengan tempat pelelangan ikan (TPI) serta kawasan wisata Pantai Trisik yang sudah ada sebelumnya sebagai kawasan industri dan pariwisata. Program tersebut menjadi obsesi pemerintah provinsi dan kabupaten karena bertujuan mengubah kawasan pantai selatan yang tandus menjadi areal pertanian tanaman sayur-sayuran, utamanya komoditas cabai, dan sekaligus kawasan industri pariwisata.

Lokasi transmigrasi Bugel dan Karangsewu memang sangat berdekatan, namun pengelola kedua daerah transmigrasi tersebut tidaklah sama. Daerah transmigrasi Bugel yang dikelola oleh pemerintah pusat merupakan lokasi percontohan yang dibangun sekitar tiga tahun sebelum proyek transmigrasi di Karangsewu. Pada sisi lain, keberhasilan di daerah Bugel memacu dimulainya program transmigrasi Karangsewu. Program ini di bawah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bekerja sama dengan Pakualaman yang merupakan bagian dari KGPAA Pakualaman sebagai pemilik daerah yang terpisah dari Kabupaten Kulon Progo. Pihak Pakualaman menghibahkan tanah sebagai hak guna bangunan (HGB), sedangkan pelaksanaannya diserahkan pada pemerintah daerah kabupaten.

Penelitian ini bertujuan mengetahui keadaan kesejahteraan transmigran yang ada di Karangsewu. Faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat transmigran dalam meningkatkan taraf hidup. Untuk menjawab tujuan tersebut, penelitian ini

mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer yang dihimpun dengan cara survei cepat (*quick survey*) di lapangan melalui observasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan beberapa informan. Informan tersebut adalah beberapa penduduk dan tokoh masyarakat setempat serta transmigran lokal Karangsewu dan Bugel. Informan terdiri dari kepala dan anggota rumah tangga transmigran, tokoh masyarakat, kepala dusun setempat yang memahami permasalahan, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Kulon Progo.

Data hasil survei cepat, observasi, dan wawancara mendalam selanjutnya dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan tujuan dan ruang lingkup penelitian. Penalaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif sehingga memungkinkan peneliti menguraikan latar belakang penelitian secara penuh dan dapat membuat hubungan informan-peneliti lebih eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel (Moleong, 2000).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Keadaan Wilayah

D.I. Yogyakarta terdiri dari empat kabupaten dan satu kota. Tiga wilayah kabupaten yang terletak di pantai selatan Samudra Hindia adalah Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo, sedangkan Kabupaten Sleman terletak di daerah lembah dan lereng Merapi. Kota Yogyakarta berada di tengah antara ketiga kabupaten lainnya. Secara geografis, untuk Kabupaten Gunung Kidul, daerah pantai selatan sangat terbatas dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai areal pertanian karena sebagian wilayahnya berupa daerah

pegunungan kapur yang tandus. Namun tidak demikian halnya dengan Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Sementara itu, kondisi geografis di daerah Sleman yang lebih subur dan potensial untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian ternyata justru lebih berkembang menjadi wilayah permukiman bagi penduduk Yogyakarta.

Walaupun kondisi geografis daerah pantai selatan (Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo) relatif kurang subur, sebagian besar daerah tadi sangat potensial sebagai objek wisata dan industri kecil. Beberapa hasil industri dari daerah pantai selatan, seperti gerabah dan anyaman, telah mampu menembus pasar internasional. Dengan kata lain, daerah-daerah tadi memiliki potensi investasi daerah dan nasional karena daerah pantai selatan masih banyak diminati oleh wisatawan mancanegara. Di samping itu, pantai selatan Kabupaten Bantul dan Kulon Progo terdiri dari hamparan lahan pertanian yang sangat subur, sistem irigasi teknis, dengan komoditas utama padi, cabai, dan peternakan kambing dan sapi.

Dengan alasan itulah Pemerintah DIY dan kabupaten-kabupaten setempat berupaya keras mengembangkan potensi-potensi yang menjadi andalan daerah setempat. Pemanfaatan potensi andalan lokal ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk dengan mengikutsertakan mereka dalam proses pengelolaan dan pengembangan wilayahnya secara terpadu. Pengembangan wilayah merupakan salah satu cara yang tepat dalam mewujudkan kesejahteraan penduduk. Hal ini senada dengan pernyataan Witoelar (2000: 15) yang mengemukakan

pengembangan wilayah adalah upaya pembangunan pada suatu wilayah atau daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber-sumber daya lokal secara optimal dan berkelanjutan dengan cara menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi (perdagangan, industri, dan pertanian), perlindungan lingkungan, penyediaan fasilitas-fasilitas pelayanan, serta penyediaan prasarana untuk transportasi dan komunikasi.

Pengembangan daerah pantai selatan Yogyakarta sampai saat ini tampak belum maksimal. Berbagai faktor penghambat yang menyebabkannya adalah lemahnya implementasi pemerintah dalam melaksanakan program pengembangan wilayah setempat, sumber daya manusia setempat, dan terjadinya berbagi kendala alam yang bersifat destruktif, utamanya banjir yang menggenangi daerah pertanian serta aksesibilitas wilayah yang rendah. Tidak terlalu berlebihan pemerintah pusat dan daerah sedang membangun jalur lintas selatan untuk memajukan daerah ini.

b. Motif Transmigran Lokal

Pengambilan keputusan untuk menjadi transmigran tidaklah mudah. Diperlukan waktu relatif lama bagi penduduk untuk mengambil keputusan menjadi transmigran. Mereka yang dengan bulat memutuskan menjadi transmigran umumnya akan lebih merasa nyaman dan bekerja keras untuk menghadapi masalah di lokasi transmigrasi. Oleh karena itu, diperlukan seleksi yang ketat terhadap penduduk yang berkeinginan menjadi transmigran. Tujuan seleksi adalah untuk mengetahui dan menentukan siapa yang layak dan tidak layak menjadi transmigran yang akan diberangkatkan menuju lokasi yang telah

disediakan. Meskipun telah dilakukan seleksi yang ketat, banyak transmigran tidak kerasan tinggal di lokasi yang baru. Hal tersebut terutama disebabkan oleh tidak terpenuhinya beberapa aspirasi transmigran yang sebelumnya dijanjikan akan diberikan pada mereka. Persoalan tersebut dipicu oleh ketidaksesuaian antara yang dijanjikan oleh pemerintah dengan kenyataan di lokasi. Oleh karena itulah, diperlukan sosialisasi informasi tentang ketransmigrasian kepada penduduk yang nantinya dapat sebagai bekal pengetahuan mereka di daerah transmigrasi.

Informasi mengenai ketransmigrasian memegang peranan yang sangat penting dalam menyukseskan program transmigrasi. Informasi yang jelas mengenai tujuan dan proses pelaksanaan transmigrasi merupakan perangsang bagi penduduk untuk mengikuti program transmigrasi. Beberapa motif penduduk untuk menjadi transmigran lokal di Karangsewu dan Bugel adalah sebagai berikut. *Pertama*, agar memiliki lahan pertanian. Fakta menunjukkan semua peserta transmigrasi tidak memiliki lahan dan dorongan demi memperoleh lahan merupakan motif utama mereka. Hal ini sesuai dengan pendapat Heeren (1979: 57) yang menyatakan pendorong utama penduduk melakukan transmigrasi adalah kekurangan lahan. Mendapatkan lahan di daerah baru merupakan harapan dan cita-cita mereka sebagai jaminan kehidupan. *Kedua*, agar memiliki tempat tinggal pribadi mengingat sebagian besar belum memiliki rumah dan masih menjadi satu dengan rumah orang tua. Dengan ikut menjadi transmigran, mereka mendapatkan jatah rumah dan tanah yang dapat meningkatkan status sosial mereka di lingkungan tempat tinggal mereka.

c. Kendala dalam Peningkatan Kesejahteraan

Untuk mencapai sasaran, pelaksanaan transmigrasi pada umumnya sering menghadapi berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut saling terkait yang meliputi aspek teknis, sosial, budaya, ekonomi, serta keadaan alam. Berbagai kendala yang ditemukan di daerah penelitian, antara lain, adalah sebagai berikut.

1. Aksesibilitas terhadap peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang berkesinambungan sangat sulit karena kondisi lahannya yang marginal (tandus, berpasir tebal, dan poreous).
2. Belum tersedianya infrastruktur bangunan sekolah, fasilitas kesehatan yang kurang memadai dan sangat terbatas, tempat-tempat usaha lain selain pertanian, dan sarana transportasi, khususnya kendaraan umum.
3. Kurangnya sarana prasarana yang diberikan, khususnya yang berkaitan dengan fasilitas permukiman perumahan dan alat-alat untuk mengolah lahan yang di bawah standar Departemen Transmigrasi.
4. Letak lahan dan permukiman tidak tepat dan kurang menguntungkan. Jatah lahan yang diberikan sangat sempit dan tidak sesuai dengan standar yang ada pada Departemen Transmigrasi.
5. Ketidaksinkronan pola pikir antara pemerintah dengan penduduk. Pemerintah lebih cenderung menerapkan kebijakan yang bersifat *top-down* penduduk hanya tunduk dan menerima arahan dari

pemerintah walaupun pada dasarnya mereka merasa sangat dirugikan. Fakta di lapangan adalah apa yang direncanakan oleh pemerintah setempat tidak sesuai sasaran.

6. Tingkat upah/pendapatan yang diperoleh setiap harinya lebih rendah daripada harga-harga kebutuhan pokok di pasaran, bahkan lebih rendah bila dibandingkan dengan sebelum ikut transmigrasi lokal.
7. Sulitnya mengolah tanah/lahan pertanian disebabkan kurangnya modal dan pengalaman serta pengetahuan para transmigran untuk bertani pada lahan pasir di pinggir pantai.
8. Kurangnya perhatian dan kontrol pemerintah yang bersifat konstruktif terhadap peningkatan kualitas pengetahuan penduduk yang mengikuti transmigrasi. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya penyuluhan pelatihan yang intensif tentang cara dalam mengolah sumber daya lokal yang ada secara optimal.

Kembali pada soal jatah lahan yang tidak potensial karena hampir semua lahan merupakan hamparan pasir di pinggir pantai. Selain tidak potensial untuk pertanian, ternyata tidak cocok untuk permukiman. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hardjono (1982: 170) bahwa hambatan utama bagi keseluruhan program transmigrasi adalah banyak tanah yang disediakan untuk proyek tidak cocok untuk permukiman. Tanah tersebut umumnya memiliki topografi yang tidak datar, rawa-rawa, dan tanah yang tidak subur atau kekurangan air dalam musim kemarau. Timbulnya berbagai macam hambatan tadi disebabkan oleh kurangnya persiapan dalam pelaksanaan

program transmigrasi, seperti kurangnya penyediaan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan kesejahteraan penduduk di daerah transmigrasi.

Oleh karena itu, program transmigrasi harus dilakukan bersama-sama dengan pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan jalan, irigasi, dan pembangunan sarana pemasaran hasil pertanian para transmigran. Di lokasi transmigrasi Bugel dan Karangsewu hingga saat ini belum dibangun infrastruktur yang dapat mendukung suksesnya program transmigrasi. Infrastruktur yang disediakan hanya berupa jalan yang beraspal sederhana. Belum ada transportasi umum yang melintasi wilayah tersebut. Hal itulah yang kurang memperlancar penduduk transmigran melakukan mobilitas kerja ke luar daerah transmigrasi. Kondisi seperti ini menjadi faktor penghambat bagi para transmigran dalam melakukan kegiatan ekonomi yang bekerja dan memasarkan hasil kerja ke luar daerah.

d. Peningkatan Kesejahteraan

Menurut Ghozali (2001: 107), transmigrasi bukan hanya sekadar perpindahan atau pemindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain di seluruh Indonesia untuk berbagai kepentingan pembangunan daerah, tetapi transmigrasi seharusnya lebih mementingkan keberhasilan masyarakat yang dipindahkan atau pindah sendiri. Dalam realitas pelaksanaannya tidaklah demikian karena program sering kali hanya dijadikan 'kambing hitam' oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menurunkan proyek bagi kepentingan individu atau sekelompok orang.

Akibatnya, program transmigrasi selama ini belum mampu mencapai tujuan untuk menciptakan kesejahteraan penduduk. Kondisi ini juga terjadi di transmigrasi lokal Bugel dan Karangsewu. Sampai saat ini indikator kinerja pelaksanaan transmigrasi lebih menekankan pada jumlah penduduk yang dipindahkan atau direlokasi, dan kesejahteraan belum menjadi sasaran utama.

Tingkat kesejahteraan penduduk transmigran hanya dapat terwujud apabila faktor-faktor penghambat mampu diatasi dan diminimalisasi sesegera mungkin. Untuk mewujudkannya sangat diperlukan keseriusan dan satu pola pikir antara berbagai pihak, seperti pemerintah, Depnakertrans, LSM, dan penduduk. Namun sayangnya, antara pemerintah dan penduduk belum berada dalam satu konsep sehingga yang dialami penduduk tidak sesuai dengan yang dijanjikan pemerintah maupun yang diharapkan oleh transmigran.

Berdasarkan kondisi di lapangan, berikut ditemukan faktor-faktor yang mampu membantu terwujudnya kesejahteraan penduduk.

1. Adanya kerja sama yang baik dan satu pola pikir antara pemerintah daerah dengan penduduk. Misalnya pemerintah memberikan modal dan fasilitas yang memadai untuk mengelola lahan/tanah pertanian yang berpasir agar mampu dijadikan lahan yang potensial sebagai sumber pengembangan ekonomi.
2. Adanya pemberian penyuluhan dan latihan kerja secara terpadu dari pemerintah kepada penduduk transmigrasi guna meningkatkan kualitas penduduknya agar

mampu mengolah lahan pinggir pantai yang diberikan dengan optimal.

3. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan yang memadai.
4. Adanya keseriusan dan konsistensi pemerintah dalam menangani permasalahan para transmigran yang sangat beragam.

Perlu diketahui juga bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan transmigran, sebagian besar penduduk sangat terikat atau terkait dengan daerah-daerah lain di sekitarnya yang tentu saja bukan daerah transmigrasi. Keterkaitannya dengan daerah-daerah lain dalam hal pencarian pekerjaan, pendidikan anak, pemanfaatan sarana kesehatan serta dalam hal pemasaran komoditi pangan yang diperoleh dari lahan pertanian. Keterkaitan ini belum terbentuk karena belum adanya sarana dan prasarana tadi di permukiman transmigran. Berdasarkan wawancara dengan beberapa kepala dan ibu rumah tangga, baik di transmigrasi Karangsewu maupun Bugel, diketahui bahwa mereka tidak hanya bergantung dengan pekerjaan mengolah lahan pertanian yang disediakan oleh pemerintah yang terletak di sekitar permukiman yang lahannya terlalu sempit dan marginal. Mereka lebih memilih mencari pekerjaan di luar daerah transmigrasi karena tidak memadainya kesempatan kerja yang disediakan di daerah transmigrasi. Pada umumnya mereka bekerja di sektor informal berskala kecil, seperti menjadi tukang becak, buruh tani, pengantar ayam ke pelanggan, buruh bangunan, atau buruh serabutan yang lebih dikenal dengan pekerja serba bisa.

Dari beberapa informan di daerah penelitian dan berdasarkan observasi di lapangan ditemukan hal seperti berikut. Sebagian besar penduduk hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar dan itu pun dilakukan dengan berbagai cara, seperti meminjam dari para tengkulak atau majikan tempat bekerja, sedangkan untuk kebutuhan sosial, seperti sarana pendidikan dan kesehatan, belum ada. Yang ada hanya fasilitas kesehatan (Posyandu) di daerah Karangsewu. Sementara itu, kebutuhan dasar lainnya sama sekali belum dapat dipenuhi karena keterbatasan pendapatan yang hanya difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Menurut BKKBN, yang termasuk kategori rumah miskin identik dengan keluarga KS 1, yaitu keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis, termasuk pendidikan, KB, komunikasi internal keluarga, interaksi sosial keluarga, dan transportasi (Jones dan Raharja, 1990: 86). Berdasarkan keadaan dan kemampuan pemenuhan hidup, rumah tangga transmigran, baik Bugel dan Karangsewu, hingga saat ini masih sebagai keluarga KS 1. Hal ini karena rata-rata penduduk setempat belum dapat memenuhi kebutuhan hidup di luar kebutuhan dasar, seperti kebutuhan sosial dan psikologis.

Melihat faktor-faktor penghambat tercapainya kesejahteraan transmigran yang terletak di daerah pesisir pantai selatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, maka dapat disinyalir tantangan ke depan yang akan dihadapi para transmigrasi Bugel dan Karangsewu adalah sebagai berikut.

1. Kurang pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan mengolah lahan pasir pantai akan menyebabkan kurang optimalnya pengolahan sumber daya lokal yang ada.
2. Lahan yang diberikan pada transmigran terlalu sempit untuk dijadikan lapangan usaha pokok, apalagi estimasi ke masa depan.
3. Kondisi tanah/lahan pertanian yang kurang potensial/marginal karena ditutupi oleh pasir yang tebal. Kondisi ini sangat mempersulit para transmigran dalam mengolahnya menjadi sumber mata pencaharian apalagi kondisi ekonomi mereka yang sangat tidak mendukung untuk mengubah lahan/tanah berpasir menjadi potensial.
4. Kesalahan konsep pendirian dan penanganan transmigrasi yang cenderung membatasi mereka dalam mengembangkan usaha sebagai sumber pendapatan.
5. Kualitas permukiman transmigrasi serta kurangnya perlengkapan yang diberikan menyebabkan permukiman tersebut tidak layak huni untuk jangka panjang.
6. Pemerintah terlalu sering terlambat memberikan/mencairkan bantuan kepada para transmigran menyebabkan lambat laun mereka tidak tahan menempati lokasi permukiman dan ada kecenderungan mereka akan meninggalkan lokasi.

e. Belajar dari Karangsewu dan Bugel

Pelaksanaan transmigrasi lokal di kedua daerah tersebut tanpa didukung oleh perencanaan yang matang sehingga

menimbulkan kesengsaraan bagi transmigran. Fakta menunjukkan hampir semua yang mengikuti program transmigrasi lokal adalah petani berlahan sempit dan buruh tani pada lahan pertanian padi basah. Mereka teragap dan tidak siap untuk mengolah lahan pasir pinggir pantai dengan angin yang cukup keras. Janji pemerintah untuk menyediakan "sumur renteng" dari bis semen sebanyak 7 hingga 10 yang saling disambungkan untuk persediaan air belum pernah terwujud. Jika ada satu atau dua transmigran yang mempunyai sumur renteng tersebut, hal itu merupakan usaha sendiri. Demikian pula transmigran menagih janji tentang diesel untuk memompa air serta tanaman pelindung angin laut. Sebagai akibatnya, hasil panen tidak dapat optimal dan sering kali gagal panen karena janji pemerintah yang tidak pernah dipenuhi hingga saat ini.

Kualitas perumahan dan lingkungan tempat tinggal sangat tidak memadai. Apa yang muncul di media cetak tentang rumah rusak sebelum ditempati ada benarnya. Tidak tersedia sumur, tidak ada listrik, tidak ada pasar dan sekolah dasar, serta fasilitas layanan dasar lainnya. Terus terang mereka menyatakan sumber utama penghidupan ada di daerah lain, di luar Karangsewu dan Bugel. Mereka bertahan di daerah lokasi transmigrasi karena masih ada jatah hidup. Biasanya beberapa hari sebelum jatah hidup diberikan banyak transmigran yang tinggal di rumah ini dan pada saat pembagian jatah hidup seolah-olah banyak penghuninya. Akan tetapi, satu atau dua hari setelah pembagian jatah hidup, daerah ini menjadi sepi sekali. Sebagian besar rumah tersebut tidak berpenghuni. Inilah Karangsewu yang sedikit banyak berbeda dengan Bugel dalam beberapa hal.

Lokasi penempatan transmigran lokal di Bugel sedikit berbeda dengan di Karangsewu. Tampaknya relokasi di Bugel (transmigrasi ring I) lebih disiapkan dan direncanakan sebelum ditempati. Lokasi perumahan semuanya di pinggir jalan aspal (saat ini rusak berat) dengan kualitas tempat tinggal dan fasilitas pendukungnya yang jauh lebih bagus. Ada sumur, penerangan menggunakan listrik tenaga matahari, dan lokasi lahan pertanian ada di samping dan belakang rumah yang dilengkapi dengan sumur renteng dan pompa diesel. Dengan fasilitas pendukung yang relatif bagus, daerah ini hanya tinggal dihuni sekitar sepertiga dari jumlah rumah tangga pada awal penempatan. Faktor penyebabnya adalah lahan marginal dan isolasi wilayah. Sebagian besar mereka meninggalkan daerah ini dan tinggal di daerah lain yang aksesibilitas daerahnya mudah untuk dijangkau.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan pemerintah daerah semestinya dapat belajar tentang berbagai kendala dalam penempatan transmigrasi lokal. Alasan demi keamanan dari ancaman banjir, tanah longsor dan sejenisnya yang diperkirakan akan menyebabkan penderitaan penduduk tersebut justru di daerah penempatan yang tidak direncanakan dengan baik. Mereka lebih menderita hingga hampir setahun di daerah lokasi penempatan.

Penutup

Salah satu masalah kependudukan yang sangat urgen untuk dibahas dan diatasi adalah masalah ketransmigrasian. Program transmigrasi merupakan salah satu sarana tercapainya tujuan pembangunan nasional

maupun daerah. Namun sangat disayangkan dari dulu sampai saat ini belum mampu mencapai target yang diharapkan karena selalu dihadapkan pada permasalahan yang sama, yaitu penempatan transmigran pada lahan kritis, marginal, dan kurang potensial untuk pengembangan ekonomi penduduk serta aksesibilitas daerah yang rendah. Alasan dan kondisi seperti itulah yang menyebabkan penduduk transmigrasi sulit untuk mencapai tingkat kesejahteraan seperti yang diharapkan.

Penempatan transmigran di Desa Karangsewu dan Bugel umumnya adalah yang berasal dari daerah rawan bencana alam, seperti tanah longsor dan erosi. Motivasi mereka bertransmigrasi adalah karena ingin mendapatkan lahan baru dan mendapatkan kesempatan kerja yang baru yang lokasinya masih berdekatan dengan daerah asal. Di daerah baru nanti mereka mengharapkan dapat mengembangkan keadaan ekonomi rumah tangga menjadi lebih baik daripada keadaan sebelum mengikuti program.

Hasil observasi dan wawancara tentang kesejahteraan transmigran menunjukkan sejak awal menempati permukiman transmigrasi sampai sekarang belum tampak ada perubahan ke arah peningkatan kesejahteraan, bahkan dalam memenuhi kebutuhan dasar pun semakin pelik karena sulitnya mendapatkan akses di daerah yang baru. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk transmigran disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kondisi lahan yang tandus dan berpasir tebal sehingga tidak/kurang potensial untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan, dan luas lahan yang sangat terbatas.

Ketidakterseriusan pemerintah dalam menangani para transmigran, seperti tidak segera dibangunkannya sumur renteng untuk menyirami sayuran sebagai komoditas utama rumah tangga transmigrasi dan mesin diesel sebagai pemompa air yang tidak kunjung ada. Demikian pula listrik, air bersih, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Kesejahteraan transmigran hanya dapat tercapai jika hal-hal tersebut dapat diatasi dan diminimalisasi sesegera mungkin dan konsisten agar mereka tidak meninggalkan daerah tersebut.

Rumah tangga transmigran dapat bertahan di daerah ini lebih banyak ditentukan oleh adanya kesempatan bekerja di daerah lain, utamanya ke Kota Wates, Bantul, dan Yogyakarta. Dan apabila mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup di lokasi transmigrasi, itu bukan karena mereka mengolah lahan di daerah transmigrasi. Saat ini jatah hidup masih sering diberikan dan apabila nanti batas waktu pemberian jatah hidup sudah habis, barangkali mereka akan semakin menderita. Inilah fakta empiris dari sebuah program pemindahan penduduk dengan bingkai ancaman bencana alam yang tidak direncanakan dengan seksama. Dengan demikian, untuk kesekian kalinya, departemen maupun pemerintah daerah tidak mau belajar dari berbagai kegagalan dalam menyusun perencanaan penempatan transmigrasi.

Daftar Pustaka

- Hardjono. 1982. *Transmigrasi: dari Kolonisasi sampai Swakarsa*. Jakarta: Gramedia.
- Heeren, H. J. 1979. *Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Jones, Gavin dan Yulvita Raharjo. 1990. *Kategori Keluarga Sejahtera*. Jakarta: BKKBN.
- Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Propinsi D.I. Yogyakarta dengan Fakultas Geografi UGM. Pelaksanaan program transmigrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
- Kustadi. 1984. *Transmigrasi: Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman*. Jakarta: Rajawali Press.
- Malingzean, J. P. 1978. *Penggunaan Lahan Pedesaan*. Yogyakarta: Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Setiawan, Nugraha, 1996, "Masyarakat miskin di pedesaan potret ketidakkuasaan", *Populasi*, 7(2): 91-97.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1997. *Migrasi Urbanisasi dan Pasar Kerja di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Witoelar, Erna. 2000. PROSIDING, Seminar Nasional, Pengelolaan Ekosistem Pantai dan Pulau-Pulau kecil Dalam Konteks Negara Kepulauan, Yogyakarta, Fakultas Geografi UGM.
- www.http , 2005, *Standard of Living*, ILO
- www.http 16 Juli 2006, Pengembangan Wilayah Bantul
- www.http , 16 Juli 2006, Pengembangan Wilayah Gunung Kidul.
- www.http . 23 Mei 2006, Pengembangan Wilayah Kulon Progo